

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN KEBUMEN
(Telaah Pasal 7)**

Oleh:

Aulia Nugrahaeni, Aloysius Rengga

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

According to Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District is an effort by the government to overcome HIV and AIDS disease in Kebumen District. Kebumen District has a high number of cases found and has an increasing trend every year. The purpose of this study is to describe how the implementation of Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District and to find out the factors driving and inhibiting Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection was done by interview, observation and literature study. The informants in this study were the staff of the Kebumen District AIDS Commission, the Kebumen District Health Office staff, members of the Peer Support Group and the community. The results show that the implementation of the law has not been successful because it is ineffective in solving HIV / AIDS related problems. In this study also found the driving factors of the implementation of local regulations are resources, disposition and bureaucratic structure, while the inhibiting factors is communication. Recommendations that can be given are the selection of appropriate communication methods, conducting regular socialization activities, providing training to cadres in the field and increasing community participation.

Keywords: policy implementation, resources, disposition, bureaucratic structure, communication

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian di Indonesia adalah penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*. AIDS merupakan kumpulan gejala dan penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan terinfeksi virus HIV. Virus tersebut masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan sehingga HIV-AIDS menjadi fokus perhatian sampai saat ini.

Di Kabupaten Kebumen, jumlah kasus HIV-AIDS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Kabupaten Kebumen sendiri kasus kasus HIV-AIDS tampak seperti fenomena gunung es. Artinya, kasus HIV-AIDS yang diketahui dan dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari jumlah sebenarnya yang terjadi sementara sebagian jumlah lainnya

yang lebih besar tersembunyi dan tidak diketahui.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus HIV-AIDS

Tahun	Jumlah
2003	1
2004	1
2005	3
2006	1
2007	3
2008	10
2009	22
2010	31
2011	44
2012	71
2013	92
2014	107
2015	107
2016	178
Total	671

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kebumen.

Dengan pertimbangan kondisi perkembangan kasus HIV-AIDS yang mengkhawatirkan di Kabupaten Kebumen, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV-

AIDS. Kebijakan penanggulangan penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen khususnya pasal 7 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan HIV-AIDS.

Namun dalam pelaksanaan upaya penanggulangan HIV-AIDS masih mengalami beberapa masalah. Masalah timbul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada.

B. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dalam menanggulangi penyakit tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen

C. Teori

Teori yang digunakan adalah :

1. Administrasi Publik

Dwight Waldo (Pasolong. 2011 : 8), mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan Nicholas Henry (Pasolong. 2011 : 8) , mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar responsif terhadap kebutuhan sosial. Dari dua definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Implementasi kebijakan

Menurut Daniel mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (Leo Agustino. 2006 : 139), implementasi merupakan pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk memstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini terjadi.

2. Situs Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, sehingga lokus atau tempat yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian di atas yang digunakan Peneliti adalah Kabupaten Kebumen.

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa informan untuk menjadi narasumber yang dapat dipercaya yang mempunyai pandangan dan wawasan yang luas mengenai adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah KPAD Kab Kebumen, Masyarakat dan LSM terkait.

4. Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu data yang berbentuk teks dan data yang

berbentuk kata-kata. Data yang berbentuk teks didapatkan dari studi dokumentasi yang diambil dari catatan-catatan, arsip, maupun teori yang diambil dari buku maupun internet. Sedangkan data yang berbentuk kata-kata diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

E. Fenomena Penelitian

1. Implementasi

Fenomena yang dipakai peneliti sebagai berikut :

1. Tujuan Penanggulangan HIV-AIDS

Tujuan berkenaan dengan apa yang ingin dikerjakan dalam melaksanakan perda tersebut.

2. Sasaran Penanggulangan HIV-AIDS

Sasaran program berkenaan dengan hasil dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan perda tersebut.

3. Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta berkenaan dengan peran dan tugas ketiganya dalam pelaksanaan perda.

4. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat berkenaan dengan pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan perda tersebut.

5. Ketersediaan Layanan Kesehatan

Ketersediaan layanan kesehatan berkenaan dengan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan perda tersebut.

2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini berkenaan dengan penyaluran informasi dan penerimaan informasi dalam pelaksanaan perda tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia, finansial dan fasilitas yang mencukupi untuk mendukung implementasi perda tersebut.

3. Disposisi

Disposisi dalam hal ini berkenaan dengan komitmen, sikap atau respon para pelaksana perda tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini berkenaan dengan pedoman dan

pembagian tugas dalam pelaksanaan perda tersebut.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen (telaah pasal 7)

1. Tujuan Penanggulangan HIV-AIDS

Peraturan daerah ini ada sejak tahun 2013 tetapi setelah berjalan selama kurang lebih tiga tahun jumlah kasus HIV-AIDS terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen yaitu menekan perkembangan dan penyebaran HIV-AIDS belum tercapai.

2. Sasaran Program Penanggulangan HIV-AIDS

Sasaran dari program penanggulangan HIV-AIDS adalah seluruh masyarakat tetapi tujuan program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen belum diketahui oleh sasaran program atau masyarakat. Informasi mengenai program penanggulangan HIV-AIDS belum sampai ke seluruh masyarakat. Sedangkan untuk target jumlah dalam pelaksanaannya masih belum mencapai target yang ditetapkan.

3. Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sudah baik. Keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan WPA. Sedangkan keterlibatan swasta masih belum optimal karena kerjasama yang dilakukan sifatnya masih situasional. Masih diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan swasta dalam hal ini

perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan bisa tercapai.

4. Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat di Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen masih belum siap. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen. Kurangnya pengetahuan masyarakat bisa disebabkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat terkait kebijakan ini. Sosialisasi yang dilakukan selama ini dirasa masih belum menyentuh seluruh masyarakat.

5. Ketersediaan Layanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung penanggulangan HIV-AIDS di

Kabupaten Kebumen sudah tersedia layanan kesehatan untuk HIV. Layanan kesehatan yang tersedia berupa laboratorium yang digunakan untuk keperluan tes HIV yang ada di setiap puskesmas. Alat-alat laboratorium itu sendiri berasal dari bantuan pemerintah pusat. Selain di puskesmas kegiatan tes HIV juga bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Kebumen. Untuk kegiatan pengobatan atau pengambilan obat dilakukan di klinik VCT RSUD Kebumen. Di klinik VCT tersebut juga tersedia bantuan susu formula bagi bayi keluarga penderita yang membutuhkan.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS.

1. Komunikasi

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, metode komunikasi menjadi faktor penghambat. Pemilihan metode komunikasi dengan menyampaikan informasi melalui media elektronik dan bertatap muka secara langsung melalui kegiatan sosialisasi dirasa sudah tepat. Namun pada kenyataannya, tidak semua informasi sampai ke masyarakat. Ini menandakan bahwa metode yang digunakan saat ini belum maksimal.

2. Sumber Daya

Fenomena sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen bisa dikatakan sebagai faktor pendukung. Tidak ada kendala dalam sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia yang ada jumlahnya sudah mencukupi dan sumber daya

manusia tersebut sudah mendapat pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Untuk sumber daya finansial baik KPA maupun Dinas Kesehatan sudah merasa cukup dengan sumber daya finansial yang berasal dari APBD. Dana yang berasal dari APBD tersebut sudah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program. Sedangkan untuk sumber daya fasilitas sudah tersedia alat laboratorium untuk tes HIV di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen.

3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen merupakan faktor pendukung. Hal ini dilihat dari komitmen Komisi Penanggulangan AIDS dan anggotanya untuk mensukseskan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Selain itu KPA dan anggotanya

selalu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan.

4. Struktur Birokrasi

struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, struktur birokrasi bisa menjadi faktor pendorong. Struktur birokrasi menjadi faktor pendorong dilihat dari aspek *standart operating procedures* (SOP). dengan tidak adanya masalah dalam pelaksanaan SOP. Sedangkan dilihat dari aspek struktur birokrasi, struktur birokrasi yang ada sudah jelas dan tidak terlalu panjang sehingga memudahkan dalam koordinasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen khususnya dalam menelaah

pasal 7 perda ini belum berjalan maksimal. Terbukti dari aspek yang dianalisis yaitu tujuan penanggulangan HIV-AIDS; sasaran program penanggulangan HIV-AIDS; keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta; kesiapan masyarakat; dan ketersediaan layanan kesehatan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai sasaran kebijakan belum memahami dan mengerti dengan jelas isi perda tersebut hal ini dikarenakan kurangnya pengenalan dari pemerintah akan kebijakan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan mengenai penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulngan HIV-AIDS di

Kabupaten Kebumen yaitu: (1) sumber daya manusia sebagai faktor pendorong, dibuktikan dengan tersedianya jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, sumber daya anggaran yang cukup, serta tersedianya sumber daya fasilitas yang memadai; (2) disposisi sebagai faktor pendorong, dibuktikan dengan komitmen serta etos kerja yang baik dari pelaksana kebijakan; (3) struktur organisasi sebagai faktor pendukung, dibuktikan dengan adanya SOP dalam melaksanakan kegiatan serta struktur organisasi yang jelas, (4) komunikasi sebagai faktor penghambat, dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. Pemilihan metode penyampaian informasi yang digunakan agar informasi bisa diterima seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan metode komunikasi yang dilakukan saat ini hasilnya belum menjangkau semua masyarakat.
2. Mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin, baik di masyarakat, sekolah maupun tempat kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
3. Memberikan pelatihan terhadap kader-kader dilapangan serta penjadwalan kegiatan rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader di lapangan terutama yang bergabung dalam WPA serta meningkatkan peran WPA di masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat agar ikut berperan dalam program

penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta yang berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan kesehatan : prinsip dan praktik*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*.

Bogor: Ghalia Indonesia

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan Edisi 5*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps
- _____. 2014. *Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus) Revisi*. Yogyakarta : Caps.
- Doukmen :
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome*
 - Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020